

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, jenis penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (*empiris*). Dalam hal ini, sosiologis (*empiris*) pun dibagi menjadi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Selanjutnya, yang dimaksud dengan studi efektivitas hukum yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yakni terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

Apabila dikaitkan dengan judul penelitian dalam skripsi ini, yang menitikberatkan terhadap efektivitas suatu lembaga dan dikaitkan dengan ketentuan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang, maka secara operasional jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Lembaga yang menjadi sasaran lokasi penelitian untuk mengambil data lapang seperti data primer amil zakat yaitu Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto. Sedangkan untuk mendapatkan data primer para muzaki yaitu datang langsung ke kantor PDAM Kabupaten Mojokerto yang merupakan tempat kerja dari para informan.

Pada penelitian hukum sosiologis, yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Menurut

Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis yang hendak melakukan uji efektivitas terhadap peraturan perundang-undangan, maka definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.³⁹

Maka dari itu, penelitian ini mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Bentuk Formulir Surat

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1984), Hlm. 53

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah komponen penting dalam penelitian untuk menganalisis rumusan masalah. Sebab itu, kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, dapat mengakibatkan hasil analisis rumusan masalah menjadi tidak maksimal. Oleh karenanya, penulis harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam sebuah penelitian. Guna mendapatkan data penelitian maka penulis membutuhkan data primer (lapang) di Lazismu Kabupaten Mojokerto dan data sekunder, seperti sebagai berikut:

1. Data Primer/Data Dasar (*Primary Data atau Basic Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya dan data empiris), baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi atau tidak resmi yang kemudian diolah sendiri oleh penulis.⁴⁰ Tidak semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah menerapkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelum melakukan wawancara, penulis datang ke kantor Lazismu Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pengamatan (*observasi*) guna memastikan bahwa penulis bisa melakukan penelitian di lembaga tersebut.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 106

Setelah observasi dan memenuhi segala bentuk administrasi seperti syarat mengajukan penelitian di lembaga tersebut maka pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, penulis bisa melakukan wawancara dengan amil zakat Lazismu Kabupaten Mojokerto. Disisi lain untuk mendapatkan data primer muzakki, penulis datang ke kantor PDAM Kabupaten Mojokerto yang merupakan tempat bekerja para informan tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder yaitu sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁴¹

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi
 - 1) Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - 2) Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
- b. Data sekunder yang bersifat publik
 - 1) Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - 2) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah yang kadang kala tidak mudah untuk diperoleh, karena bersifat rahasia.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hlm. 12

3) Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Penelitian ini menggunakan data sekunder bersifat publik terutama data resmi dari instansi pemerintah yang bersifat rahasia yaitu data muzaki yang telah melakukan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) atas zakat yang telah dibayarkan ke Lazismu Kabupaten Mojokerto seperti Bukti Setoran Zakat dan SPT Tahunan 1770 S milik muzakki P. Dapat dikatakan rahasia karena hanya muzaki, admin Lazismu dan staf keuangan Lazismu yang dapat memiliki Bukti Setoran Zakat tersebut. Apabila ada kecurangan atau penyelewengan, maka tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ke tiga orang tersebut di atas.

Selain itu, data SPT 1770-S milik muzaki juga merupakan data sekunder yang digunakan penulis untuk mengolah perhitungan zakat pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan berlandaskan Lampiran IV Peraturan DJP Nomor PER- 19/PJ/2014 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya, tertera petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770 S yang mana memuat perhitungan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). SPT Tahunan 1770 S juga bersifat rahasia karena hanya bisa dimiliki oleh muzakki dan staf keuangan kantor tersebut.

Berdasarkan sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam berbagai macam bahan hukum, diantaranya:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- 7) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- 8) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- 9) Lampiran IV Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur ilmu hukum, jurnal, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia Ensiklopedia Bebas, ensiklopedia, transliterasi dan sebagainya.⁴²

C. Populasi/Sampel

Di dalam teori mengenai tata cara sampling, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling (non random sampling)*. Bentuk-bentuk dari *non probability sampling (non random sampling)* ada 3 (tiga), yaitu:⁴³

1. *Quota sampling*, tujuan utama dari quota sampling adalah mendapatkan suatu replika dari populasi, yang hendak digeneralisasikan oleh peneliti. Misalkan terdapat populasi terdiri dari jumlah wanita dan pria yang seimbang, maka akan diteliti jumlah wanita dan pria yang seimbang tersebut.

⁴² Ibid, Hlm. 52

⁴³ Ibid, Hlm. 193

2. *Accidental sampling*, berarti pengambilan sampel dengan sesuka hati, yaitu dengan menunjuk siapa yang ditemukan sebagai sampel.⁴⁴
3. *Purposive sampling*, tata cara ini diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sample yang ditariknya. Maka dari itu, harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sample.⁴⁵

Pengambilan sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *non probability sampling (non random sampling)* bentuk *purposive sampling*. Sebab dalam populasi amil zakat dan muzaki Lazismu Kabupaten Mojokerto, perlu diterapkan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Syarat yang harus dipenuhi oleh muzakki diantaranya memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tercatat sebagai muzaki yang rutin membayar zakat di Lazismu Kabupaten Mojokerto pada setiap bulannya dan sedang berencana atau sudah melakukan pengurangan zakat terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Adapun beberapa keuntungan dari tata cara *purposive sampling*, diantaranya:⁴⁶

1. Tata cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak banyak menelan biaya. Kadang kala tata cara ini disamakan dengan quota sampling. Namun perbedaannya adalah pada tata

⁴⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), Hlm. 108

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hlm. 196

⁴⁶ Ibid.

cara ini peneliti lebih banyak menaruh perhatian pada unsur-unsur yang harus masuk di dalam sample yang ditariknya.

2. Tata cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang valid tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*). Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan salah satu, ataupun gabungan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.⁴⁷ Namun, penulis hanya menggunakan dua jenis alat pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan di lapang, yaitu:

1. Pengamatan (*observasi*)

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah terbiasa untuk melakukan pengamatan terhadap sesamanya. Dengan melakukan pengamatan-pengamatan tertentu, manusia juga dapat mempelajari gejala-gejala disekitarnya yang pada suatu saat menjadi pusat perhatiannya. Walaupun demikian, tidak semua pengamatan yang dilakukan oleh manusia, merupakan suatu pengamatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah. Bahkan tidak semua pengamatan dapat dikualifikasikan sebagai suatu sarana, untuk mengumpulkan data secara sistematis dan metodologis serta konsisten.

⁴⁷ Ibid, Hlm. 21

Apabila dilihat dari sudut sejarahnya, di dalam melakukan kegiatan ilmiah seperti penelitian, pengamatan (*observasi*) merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua. Sejak zaman dahulu, para ahli filsafat melakukan pengamatan terhadap masyarakat, dan atas dasar pengamatan-pengamatan tersebut dirumuskanlah nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Ciri-ciri pokok dari proses pengamatan (*observasi*), diantaranya:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
- b. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati,
- d. Mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Pengamatan (*observasi*) dalam hal ini, juga berbeda dengan penerapan eksperimen sosial. Pada eksperimen sosial, situasi dibuat dengan sengaja untuk kemudian diamati. Sedangkan pada pengamatan (*observasi*), yang diamati adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja. Adapun tujuan utama dari pengamatan (*observasi*), diantaranya:

- a. Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi di dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya,

- b. Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya,
- c. Mengadakan eksplorasi (penjelajahan).

Maka, dalam penelitian ini pengamatan (*observasi*) penting dilakukan untuk memahami perilaku muzaki dalam membayar zakat di Lazismu Kabupaten Mojokerto. Apakah sudah menerapkan peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada, atau bahkan tidak tahu menahu tentang ketentuan tersebut. Tidak semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara adalah situasi peran antar pribadi dengan bertatap muka, yaitu ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁸ Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Adapun ciri-ciri wawancara secara umum, adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal, artinya:
 - 1) Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.

⁴⁸ Ibid, Hlm. 82

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hlm. 24-25

2) Wawancara juga dapat didakan dengan alat tertentu, misalnya telepon dan sosial media. Jadi tidak selalu harus dengan cara tatap muka.

3) Wawancara tidak terbatas antara dua orang saja (dapat lebih jumlahnya).

b. Data/informasi/keterangan dicatat atau direkam oleh pewawancara.

c. Hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai mempunyai struktur tertentu, yaitu:

1) Sifatnya sementara,

2) Pihak-pihak yang berhubungan berada dalam konteks yang asing (walaupun misalnya mereka sudah kenal).

d. Walaupun berstruktur, akan tetapi secara relatif format wawancaranya adalah luwes.

Berdasarkan ciri-ciri wawancara di atas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa fungsi dari wawancara adalah untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang berkompeten, guna memperoleh keterangan mengenai apa yang diinginkan dengan mencaat atau merekam.

Adapun wawancara langsung dengan tatap muka yang dilakukan oleh penulis kepada amil zakat beserta muzakki Lazismu Kabupaten Mojokerto, untuk menanyakan beberapa hal guna mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada. Seperti pengetahuan amil zakat dan muzaki tentang Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak. Apabila ada data-

data yang masih dibutuhkan oleh penulis, maka dapat langsung ditanyakan melalui sosial media yaitu whatsapp.

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian yuridis sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh penulis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁵⁰

Sejarah perkembangannya, ilmu-ilmu sosial pada umumnya terpengaruh oleh dua perspektif teoritis yaitu *positivisme* dan *fenomologi*. Hakikatnya para fenomenolog lebih mementingkan pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, seorang fenomenolog akan berusaha mengumpulkan data dengan mempergunakan pengamatan terlibat, pedoman pertanyaan (pedoman wawancara) dan mungkin menganalisa dokumen-dokumen pribadi.⁵¹

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, apabila menggunakan analisis data kualitatif

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 167-168

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hlm. 249

tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran dan latar belakang hal tersebut.

Setelah memperoleh data primer dan data sekunder dengan dilengkapi data tersier, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah efektivitas Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan.

